

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. UMUM**

Pada hakekatnya, pembangunan merupakan suatu rangkaian upaya yang dilakukan terus menerus untuk mencapai suatu tingkat kehidupan masyarakat yang sejahtera lahir dan batin. Upaya dimaksud dilakukan melalui pemanfaatan potensi yang dimiliki, manusia yang berkualitas, kemampuan dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta memperhatikan tantangan perkembangan global. Propinsi DKI Jakarta sebagai ibu kota negara dan pusat kegiatan ekonomi nasional selama ini terus melakukan pembangunan di segala aspek kehidupan, agar masyarakat merasa aman, nyaman, tentram, serta dapat berkarya secara baik dan mencintai kotanya.

Namun demikian sejak terjadinya krisis ekonomi berkepanjangan yang kemudian berkembang menjadi krisis multi-dimensional di bidang politik, hukum dan sosial, pembangunan di Propinsi DKI Jakarta mengalami sedikit kemunduran. Kondisi yang tidak menguntungkan ini sangat dirasakan dampaknya oleh masyarakat Jakarta terutama pasca kerusuhan Mei 1998. Perubahan cepat terjadi pada sikap dan perilaku masyarakat yang cepat bersikap putus asa, penuh kekhawatiran dan ketidakpastian dalam melaksanakan aktivitasnya, sementara kepercayaan terhadap pemerintah sedikit menurun terutama berkaitan dengan penegakan hukum dan perlindungan terhadap masyarakat. Perubahan menuju perbaikan yang diharapkan juga berjalan relatif lambat, karena berbagai faktor yang melatar belakungnya.

Pengalaman ini memunculkan terjadinya proses pemikiran mengenai paradigma baru pembangunan nasional dan regional yang akan lebih banyak

melibatkan peranserta masyarakat dalam proses pembangunan dan mengurangi peranan pemerintah yang terlalu dominan selama ini. Dengan adanya pemikiran baru ini diharapkan semua kepentingan masyarakat yang memiliki latar belakang sosial dan ekonomi yang sangat beragam dapat diakomodasikan, tanpa menghilangkan keinginan bersama untuk mewujudkan masyarakat Jakarta yang khas, metropolis dan modern dengan tetap menjunjung kerukunan dan keharmonisan sebagai warga kota yang baik.

Dengan diberlakukannya otonomi daerah sejak tahun 2001 serta perubahan lingkungan strategis yang cepat, maka ada dua tantangan yang akan dihadapi Jakarta ke depan, pertama; kesiapan dalam menghadapi globalisasi dan perdagangan bebas dunia, dimana Jakarta harus berkompetisi dengan kota-kota besar di dunia secara lebih mandiri, dan kedua adalah upaya membangun kerjasama antar daerah yang sinerjik dan saling menguntungkan berdasarkan potensi yang dimiliki masing-masing daerah. Dengan adanya tantangan ini diharapkan Jakarta mampu memanfaatkan peluang dan potensinya untuk memainkan peranan dan kontribusi lebih besar bagi kepentingan bangsa dan negara. Untuk itu perhatian Pemerintah Propinsi DKI Jakarta, sektor swasta dan segenap komponen masyarakat sangat diperlukan guna menyikapi tantangan tersebut, termasuk pula keharusan pemerintah untuk terus melakukan regulasi, deregulasi, debirokratisasi, rekapitalisasi, reposisi, relokasi dan restrukturisasi berbagai aspek penyelenggaraan pemerintahan untuk mewujudkan iklim usaha yang lebih kondusif dan kehidupan masyarakat yang lebih nyaman dan sejahtera.

Untuk memainkan peranannya dalam pembangunan secara lebih proporsional, dimana Pemerintah Propinsi DKI Jakarta membutuhkan APBD yang kuat, baik besaran maupun strukturnya. Namun mengingat Jakarta tidak memiliki sumberdaya alam yang memadai maka upaya untuk memperkuat APBD sebagai salah satu stimulus pembangunan harus dilakukan dengan menggali potensi sumber pendapatan asli daerah melalui peningkatan penerimaan pajak

dan retribusi yang selama ini belum berjalan optimal serta mencari sumber-sumber penerimaan baru sesuai dengan era otonomi daerah.

Dengan kondisi dan permasalahan di atas, maka tugas-tugas Pemerintah Propinsi DKI Jakarta dalam penyelenggaraan pelayanan masyarakat, pembangunan sarana dan prasarana umum serta pengembangan kehidupan sosial-ekonomi dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat menjadi semakin kompleks. Oleh karena itu untuk memberikan arah pembangunan yang lebih jelas bagi para stakeholder pembangunan maka disusunlah kebijakan dan program pembangunan Propinsi DKI Jakarta yang selanjutnya disebut Program Pembangunan Daerah (Propeda) Propinsi DKI Jakarta tahun 2002-2007. Propeda dimaksudkan pula untuk memacu penyelenggaraan pembangunan di Propinsi DKI Jakarta agar lebih menjamin tercapainya sasaran pembangunan 5 (lima) tahun mendatang, yaitu pemulihan dan pemantapan basis sosial dan ekonomi untuk perbaikan taraf kehidupan masyarakat, serta meningkatkan citra kota Jakarta sebagai ibu kota negara RI dan kota internasional. Setiap program yang dimuat dalam Propeda Propinsi DKI Jakarta dilengkapi dengan indikator kinerja agar dapat dipakai sebagai alat kendali dan tolok ukur penyelenggaraan pembangunan.

Propeda Propinsi DKI Jakarta 2002-2007 disusun dengan mengacu pada Program Pembangunan Nasional (Propenas) dan Pola Dasar Pembangunan Daerah (Poldas) Propinsi DKI Jakarta 2002-2007. Penyusunan Propeda didasarkan pada Undang-Undang Nomor 25 tahun 2000, dimana disebutkan bahwa di tingkat daerah, Pemerintah Daerah menyusun Program Pembangunan Daerah (Propeda) lima tahunan yang memuat kebijakan dan program-program pembangunan bagi daerahnya dan ditetapkan bersama DPRD, dalam bentuk Peraturan Daerah.

Sangat disadari bahwa pembangunan Propinsi DKI Jakarta dalam 5 (lima) tahun mendatang akan banyak mengalami tantangan dan perubahan yang cukup berarti karena derasnya tuntutan reformasi di bidang politik, hukum dan

ekonomi serta perhatian masyarakat yang semakin ketat terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

Lebih jauh Propeda Propinsi DKI Jakarta diharapkan dapat menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Strategis Daerah (Renstrada) serta pedoman bagi instansi/unit kerja di lingkungan Propinsi DKI Jakarta dalam menyusun rencana strategis dan melaksanakan kegiatan pembangunan. Propeda Propinsi DKI Jakarta juga diharapkan dapat menjadi acuan dan materi informasi publik bagi masyarakat dan kalangan bisnis tentang arah pembangunan Jakarta lima tahun kedepan. Oleh karena itu, agar Propeda Propinsi DKI Jakarta memiliki kekhasan tersendiri dalam pembangunan kota serta relevan dengan masalah-masalah yang dihadapi pemerintah dan masyarakatnya, maka penyusunannya dilakukan dengan melibatkan berbagai pihak, baik dari kalangan pemerintah, dunia usaha, dunia pendidikan, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) maupun para pakar. Untuk itu aspirasi yang muncul dan terus berkembang di masyarakat sejauh mungkin diakomodasikan dalam Propeda Propinsi DKI Jakarta.

## **B. VISI DAN MISI PEMBANGUNAN PROPINSI DKI JAKARTA**

### **1. Visi dan Misi Propinsi DKI Jakarta**

Permasalahan Propinsi DKI Jakarta pada prinsipnya berakar dari tuntutan peran dan fungsinya yang sedemikian besar, baik dalam lingkup nasional maupun daerah. Peran Propinsi DKI Jakarta sebagai ibukota negara dan fungsi Propinsi DKI Jakarta sebagai kota jasa (*service city*) **menghendaki adanya** visi, misi, tujuan dan strategi pembangunan yang mampu mengakomodasi semua kepentingan tersebut di atas secara terpadu. Konflik kepentingan yang muncul, khususnya dalam **menentukan** prioritas pembangunan, hendaknya dapat dieliminir karena telah menyebabkan timbulnya permasalahan-permasalahan hampir di semua sektor.

## **2. Persoalan Dalam Memenuhi Peran Propinsi DKI Jakarta Sebagai Ibukota Negara**

Peran Propinsi DKI Jakarta sebagai ibukota negara, pusat pemerintahan dan kota internasional dalam perkembangannya selalu menghadapi masalah yang kompleks. Untuk menampilkan citra bangsa dan negara bagi dunia luar, serta sebagai tempat kedudukan hampir keseluruhan perangkat pemerintahan tingkat nasional, perwakilan negara-negara asing, pusat-pusat perusahaan multi nasional, dan gerbang utama wisatawan manca negara, Propinsi DKI Jakarta dituntut terus berbenah diri. Sarana dan prasarana yang belum memadai, daya dukung lingkungan yang makin terbatas, serta kemajuan masyarakat metropolitan menjadi ciri umum permasalahan pembangunan yang dihadapi. Selama ini, kebijaksanaan dan arahan pembangunan yang ditempuh pemerintah daerah selalu berorientasi kepada 2 hal pokok yakni:

1. Mempercepat pembangunan untuk segera dapat mengantisipasi dan mengatasi masalah-masalah di dalam masyarakat.
2. Mempercepat pembangunan untuk segera dapat mencapai kesejahteraan masyarakat yang lebih baik.

Akan tetapi kemakmuran yang dicapai masih menghadapi masalah besar yang seringkali dapat menimbulkan permasalahan baru, terlebih dalam masa pemulihan pasca krisis.

## **3. Fungsi Propinsi DKI Jakarta Sebagai Kota Jasa (*Service City*)**

Untuk mendukung fungsi Propinsi DKI Jakarta sebagai kota jasa (*service city*), maka pembangunan yang dilakukan harus mendukung fungsi-fungsi pelayanan kota yang hampir seluruhnya tidak hanya dinikmati dalam skala lokal, tetapi juga nasional dan internasional. Penjabaran dari Propinsi DKI Jakarta sebagai kota jasa (*service city*) adalah:

1. Pusat Pelayanan Masyarakat
2. Pusat Perdagangan dan Distribusi

3. Pusat Keuangan
4. Pusat Pariwisata
5. Pusat Pelatihan dan Informasi

Pemenuhan keseluruhan fungsi tersebut memerlukan upaya pembangunan yang sangat besar, dan tidak mungkin dilaksanakan sendiri oleh pemerintah daerah. Peran Propeda Propinsi DKI Jakarta 2002-2007 sangat besar dalam memberikan arah bagi penetapan program-program pembangunan yang strategis dan mempunyai dampak ganda (*multiplier effect*), yang mampu mengangkat kinerja pembangunan.

Guna menyamakan persepsi tentang arah dan kebijakan umum pembangunan, perlu dirumuskan visi dan misi pembangunan Propinsi DKI Jakarta, sehingga terbangun komitmen yang kuat dari pemerintah, sektor swasta dan warga Jakarta untuk bersama membangun kotanya. Di sisi lain visi dan misi ini juga menjadi acuan dalam merumuskan program-program pembangunan.

#### **a. Visi Pembangunan Propinsi DKI Jakarta**

“Terwujudnya Jakarta sebagai Ibukota Negara Republik Indonesia yang manusiawi, efisien dan berdaya saing global, dihuni oleh masyarakat yang partisipatif, berakhlak, sejahtera dan berbudaya, dalam lingkungan kehidupan yang aman dan berkelanjutan”

Pemahaman terhadap visi tersebut adalah sebagai berikut:

- i. Jakarta sebagai ibukota negara, kota perdagangan dan jasa hendaknya memiliki daya saing global dan mampu menjalankan fungsinya secara efisien, sehingga representatif dipandang dari kepentingan nasional dan internasional.

- ii. Jakarta hendaknya dihuni oleh warga kota yang sejahtera, berakhlak, berbudaya dan berdisiplin tinggi, produktif serta memiliki kecintaan dan komitmen untuk berpartisipasi dalam membangun kotanya.
- iii. Jakarta hendaknya memiliki penataan kota dan lingkungan yang baik, agar dapat lebih menjamin dinamika kehidupan berkelanjutan.

**b. Misi Pembangunan Propinsi DKI Jakarta**

- i. Meningkatkan pembangunan sarana dan prasarana kota yang efisien, efektif, kompetitif dan terjangkau, menuju Jakarta sebagai Kota Jasa (*Service City*)
- ii. Mewujudkan pembangunan yang adil, ramah lingkungan dan berbasis partisipasi masyarakat
- iii. Menegakkan supremasi hukum, meningkatkan keamanan, ketentraman dan ketertiban kota
- iv. Meningkatkan kualitas kehidupan dan kerukunan warga kota
- v. Melaksanakan pengelolaan tata pemerintahan kota yang baik

Pemahaman terhadap misi tersebut adalah sebagai berikut:

- i. Untuk mampu berfungsi sebagai ibukota negara dan pusat perdagangan dan jasa yang representatif, ketersediaan prasarana dan sarana kota yang memadai, efisien dan efektif mutlak diperlukan, sekaligus menjamin berlangsungnya kegiatan ekonomi dan investasi secara produktif.
- ii. Pada dasarnya pembangunan harus diarahkan secara lebih adil dan merata, ramah lingkungan serta memberi peluang seluas-luasnya bagi partisipasi masyarakat, agar tumbuh rasa memiliki dan komitmen dalam proses pembangunan dan hasil-hasilnya.
- iii. Supremasi hukum, keamanan, ketentraman dan ketertiban kota disadari telah menjadi kebutuhan pokok masyarakat dan pra-kondisi bagi

berlangsungnya pembangunan dan aktivitas kota yang lebih efisien dan produktif.

- iv. Kualitas kehidupan kota yang lebih baik dan kerukunan warga kota menjadi pendorong bagi berlangsungnya berbagai aktivitas masyarakat secara lebih aman, damai, harmonis dan sinergis.
- v. Pengelolaan tata pemerintahan kota yang baik didukung oleh aparatur yang profesional, memiliki spirit, etos kerja dan komitmen tinggi, serta didukung sistem informasi yang handal, dapat lebih menjamin kinerja pemerintah dalam meningkatkan pelayanan masyarakat, menciptakan kepastian hukum, transparansi dan akuntabilitas publik.

### **C. LANDASAN DAN KEDUDUKAN PROPEDA**

Propeda Propinsi DKI Jakarta merupakan dokumen perencanaan manajerial-komprehensif yang memuat arah dan kebijakan umum pembangunan Propinsi DKI Jakarta lima tahunan (2002-2007), arah dan kebijakan bidang, struktur program dan fungsi yang lengkap serta sistematis menurut bidang dan rumusan indikator kinerja program. Karena bersifat manajerial-komprehensif, maka pelaksana utama pembangunan bukan hanya Pemerintah Propinsi DKI Jakarta, melainkan juga Pemerintah Pusat, dunia usaha dan masyarakat luas. Untuk itu, maka sumber pembiayaan bisa berasal dari APBN, Bantuan Luar Negeri (BLN), APBD Propinsi DKI Jakarta, serta investasi swasta dan swadaya masyarakat.

Program Pembangunan Nasional (Propenas) dan Pola Dasar Pembangunan Propinsi DKI Jakarta merupakan acuan eksekutif dan legislatif dalam menyusun Program Pembangunan Daerah (Propeda) Propinsi DKI Jakarta 2002-2007, Propeda Propinsi DKI Jakarta 2002-2007 kemudian menjadi acuan bagi penyusunan Rencana Strategis Daerah (Renstrada) Propinsi DKI Jakarta, Rencana Pembangunan Tahunan Daerah (Repetada) dan APBD.

## **D. SISTEMATIKA PENYUSUNAN**

Propeda Propinsi DKI Jakarta disusun dengan mengikuti sistematika dan struktur bab, sebagai berikut:

- BAB I.     Pendahuluan
- BAB II.    Pembangunan Propinsi DKI Jakarta 2002-2007
- BAB III.   Permasalahan dan Arah Kebijakan
- BAB IV.    Pembangunan Hukum, Ketentraman Ketertiban Umum dan Kesatuan Bangsa
- BAB V.     Pembangunan Pemerintahan
- BAB VI.    Pembangunan Ekonomi
- BAB VII.   Pembangunan Pendidikan dan Kesehatan
- BAB VIII.  Pembangunan Kependudukan dan Ketenagakerjaan
- BAB IX.    Pembangunan Sosial dan Budaya
- BAB X.     Pembangunan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup
- BAB XI.    Pembangunan Sarana dan Prasarana Kota
- BAB XII.   Pembiayaan Pembangunan
- BAB XII.   Penutup

Pada setiap bab pembedangan pembangunan (Bab IV sampai dengan Bab XI) diuraikan tentang kondisi umum, arah kebijakan serta program-program pembangunan yang dilengkapi dengan arahan kegiatan pokok untuk setiap program. Dilampirkan pula Kerangka Makro Ekonomi Propinsi DKI Jakarta yang merupakan acuan dan pedoman bagi pelaksanaan pembangunan Propinsi DKI Jakarta lima tahun ke depan.